

**EFEKTIVITAS SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE) ATAS BARANG DAN JASA  
DI KABUPATEN BANJARNEGARA**

**Peni Yulia Astuti<sup>1</sup>, Ali Rokhman<sup>2</sup>, Sukarso<sup>2</sup>**

Program Studi Magister Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jenderal Soedirman

***SUMMARY***

One of e-government services that were adopted by the Government District Banjarnegara is Procurement of Goods/Services in Electronics (LPSE) in order to fix some of the weaknesses of the procurement of government goods/ services are carried out manually. This study aims to assess and analyze the effectiveness of Electronic Procurement System (SPSE) in the Procurement of Goods/Services in the District Banjarnegara.

The study was conducted at the office of the District LPSE Banjarnegara, this study uses the effectiveness of Electronic Procurement System (SPSE) in the Procurement of Goods/Services in the District Banjarnegara. Data were obtained through interviews with informants related to the implementation of the Electronic Procurement System (SPSE) In District Banjarnegara and conduct research on a data source in the form of archives, documents, statistical data, and other important texts related to the research. The analysis was performed in 3 (three) using the stages: data reduction, data presentation and conclusion Manufacture, Verification, and Reflection

The results showed that the application of LPSE in the district. Banjarnegara have increased transparency in the procurement of government goods/services 5 (five) assessment indicators, namely Production, Efficiency, Satisfaction, excellence and development to assess the extent of the effectiveness of the implementation of the SPSE in the district. Banjarnegara which already shows a fairly good category/ quite Effective.

Keywords: Effectiveness, Efficiency, Procurement of Government Goods/Services in Electronics

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Prodi Magister Ilmu Administrasi UNSOED

<sup>2</sup> Dosen Prodi Magister Ilmu Administrasi UNSOED

## I. PENDAHULUAN

Pengadaan Barang/Jasa pemerintah adalah salah satu hal penting dalam setiap instansi pemerintah. Ketersediaan barang/jasa memberikan pengaruh langsung terhadap roda pemerintahan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Dalam konteks demikian, tentunya proses pengadaan barang/jasa diharapkan efektif, efisien, ekonomis dan berdaya guna, baik terhadap satuan kerja lembaga pemerintah maupun masyarakat secara luas. Pengadaan Barang/Jasa pemerintah adalah salah satu hal penting dalam setiap instansi pemerintah. Ketersediaan barang/jasa memberikan pengaruh langsung terhadap roda pemerintahan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Dalam konteks demikian, tentunya proses pengadaan barang/jasa diharapkan efektif, efisien, ekonomis dan berdaya guna, baik terhadap satuan kerja lembaga pemerintah, maupun masyarakat secara luas.

Sebagai upaya pemberantasan korupsi khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, oleh karena itu diperlukan adanya inovasi dan ide-ide baru yang dalam proses penerapannya tidak menyalahi aturan-aturan yang berlaku. Tantangan untuk mewujudkan inovasi tersebut adalah dengan memanfaatkan kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berbasis internet. Dewasa ini hampir sebagian besar institusi pemerintah di pusat maupun di daerah mengaplikasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tersebut dengan membangun berbagai portal (*website*) dengan tampilan beragam dan menyediakan berbagai informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari institusi yang bersangkutan. Hal yang demikian dikenal sebagai *e-Government*, yang diharapkan dapat mendorong terjadinya reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di mana transparansi kebijakan dan pelaksanaan otonomi daerah akan makin mudah dikelola dan diawasi.

Salah satu upaya pemerintah Kab. Banjarnegara untuk menciptakan transparansi kebijakan publik adalah dengan pengembangan *E-Government* yang merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Salah satu hal yang menjadi perhatian bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (pengguna) dan pihak swasta (penyedia) adalah masalah sistem pengadaan barang/jasa itu sendiri. Salah satu bentuk sistem pengadaan barang/jasa pemerintah terkini adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (*e-procurement*).

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan unit kerja penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa yang didirikan oleh Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/ BUMN dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dan

untuk Pemerintah Kab. Banjarnegara dikenal dengan nama LPSE Kab. Banjarnegara yang pengelolaannya berada di Bagian Pembangunan Setda Kab. Banjarnegara. *E-Procurement* merupakan salah satu media yang sangat efektif untuk menekan pembiayaan proses lelang baik dari sisi penyedia barang/jasa maupun Instansi Pemerintah sebagai pengguna barang/jasa. Adanya LPSE dengan sistem *e-procurement* menuntut para pengguna dan penyedia barang/jasa untuk meningkatkan pengetahuan, karena dengan diterapkannya *e-procurement* memberikan pengalaman baru bagi para pengguna dan penyedia barang/jasa agar terbiasa dengan perubahan sistem lelang yang semula dari sistem manual menjadi sistem elektronik. Perubahan dari bentuk dokumen ke dalam bentuk file. Upaya peningkatan pengetahuan tersebut langsung atau tidak langsung meningkatkan pula pengetahuan masyarakat secara umum, yang berujung pada meningkatnya etos kerja karena bertambahnya pengetahuan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengguna dan penyedia dalam menghasilkan Barang/Jasa yang berkualitas. Berbeda dengan inisiatif *e-government* yang umumnya bersifat sektoral, *e-procurement* bersifat lintas sektor dan membutuhkan koordinasi antar sektor. Seluruh unit usaha dalam organisasi pasti melakukan kegiatan pengadaan dan oleh karenanya pasti memerlukan proses pengadaan. Jadi, *e-procurement* merupakan inisiatif yang dibutuhkan di seluruh komponen organisasi.

Berdasarkan karakteristik diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang keefektifan *e-procurement* yang dianggap sebagai salah satu inisiatif *e-government* yang paling efektif memberikan hasil nyata dalam bentuk transparansi dan efisiensi proses pengadaan pemerintah jika dibandingkan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah secara konvensional/manual di Kab. Banjarnegara.

### **1.1. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahan yaitu: sejauh mana efektivitas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kab. Banjarnegara.

### **1.2. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis, yaitu: Untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas SPSE dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kab. Banjarnegara.

## **II. METODE PENELITIAN**

Menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

### **2.1. Fokus Penelitian**

Fokus dalam Penelitian ini dibatasi pada pencapaian efektivitas proses pengadaan barang/jasa dengan SPSE yaitu proses persiapan pengadaan, pengumuman pelelangan, pendaftaran peserta lelang, penjelasan pelelangan, penyampaian penawaran, proses evaluasi, lelang gagal dan pelelangan ulang, pengumuman calon pemenang lelang dan sanggah secara elektronik pada ULP Kab. Banjarnegara.

## **III. HASIL PENELITIAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan dapat dikatakan pelaksanaan SPSE di Kab. Banjarnegara mampu meningkatkan keefektifan pencapaian produk/jasa atau pelaksanaan proyek yang lebih sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan. Dari sudut pembiayaan LPSE juga dapat menekan biaya pengadaan barang/jasa yang sebelumnya dilaksanakan secara manual. Keefektifan yang dirasakan oleh para mitra penyedia barang/jasa diantaranya adalah waktu yang lebih cepat, transparan dan memudahkan mitra untuk mengikuti program pengadaan barang/jasa meskipun kedudukan atau lokasi perusahaan jauh dari kantor sekretariat pengadaan barang/jasa. Penilaian keefektifan SPSE dapat dilihat berdasarkan 5 (lima) indikator yaitu,

### **1. Produksi**

Dalam menilai Efektivitas SPSE di Kab. Banjarnegara digunakan sub aspek Peningkatan pelaksanaan verifikasi terhadap penyedia barang/jasa yang telah terdaftar di LPSE dan Peningkatan keikutsertaan penyedia barang/jasa dalam lelang di LPSE. Dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara kuantitas dan kualitas perusahaan rekanan yang mengikuti lelang pengadaan barang/jasa menjadi meningkat. Selanjutnya dari segi kuantitas atau jumlah peserta perusahaan yang mengajukan penawaran semakin banyak, dan dari segi kualitas, pemerintah memiliki beberapa pilihan perusahaan yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan standar kualitas dan pencapaian yang diharapkan karena penerapan SPSE mendorong persaingan bisnis para perusahaan/rekanan agar semakin profesional. Serta diketahui lelang elektronik memang menghasilkan kompetitor yang lebih banyak, bahkan terlihat pula nama beberapa perusahaan lain dari luar Kabupaten Banjarnegara, sehingga hal ini membuktikan bahwa pihak yang berpartisipasi dalam lelang elektronik lebih banyak karena tidak terhambat dengan masalah jarak, waktu dan informasi.

Kemudahan sistem SPSE sangat menarik bagi para perusahaan rekanan untuk memperoleh informasi tanpa harus datang langsung. Dan lelang yang terbukti menghasilkan pesaing yang lebih banyak, sehingga hal ini memastikan bahwa peserta yang terpilih memang yang paling baik dari banyaknya penawaran yang ada. Maka dapat disimpulkan bahwa sudah tercapai efektivitas proses pengadaan barang/jasa dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di Kab. Banjarnegara. Dari uraian tersebut dapat diuraikan bahwa produksi SPSE di Kabupaten Banjarnegara:

1. Jumlah rekanan yang mengikuti lelang dengan sistem LPSE lebih banyak dan lebih bersaing sehingga dapat memperoleh harga yang lebih kompetitif.
2. Lelang elektronik di Kab. Banjarnegara terbukti menghasilkan pesaing yang lebih banyak, sehingga hal ini memastikan bahwa peserta yang terpilih memang yang paling baik dari banyaknya penawaran yang ada.

## 2. Efisiensi

Aspek kedua yang digunakan dalam menilai efektivitas Pengadaan barang/jasa dengan SPSE adalah aspek Efisiensi, dimana aspek ini menggunakan 2 (dua) sub aspek yaitu : Anggaran yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Barang/Jasa melalui LPSE dan Jangka waktu dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa. Penggunaan SPSE dapat menyaring mitra-mitra yang memiliki kualifikasi lebih baik ditinjau dari kemampuan mitra dalam memanfaatkan teknologi informasi. Dari penelitian ini, dapat diuraikan bahwa Efisiensi SPSE di Kabupaten Banjarnegara :

1. Sistem *E-Procurement* lebih efisien dan tidak memakan biaya yang tinggi. Namun untuk membuka halaman LPSE yang merupakan sarana *e-proc*, dibutuhkan kualitas koneksi yang cukup baik, dan tentunya akan memakan biaya yang cukup tinggi.
2. Kemudahan sistem SPSE sangat menarik dan memudahkan bagi para perusahaan rekanan untuk memperoleh informasi tanpa harus datang langsung.

## 3. Kepuasan

Pelaksanaan SPSE di Kab. Banjarnegara sudah mencapai efektivitas dari segi kepuasan, dengan hasil pemenang lelang melalui *e-proc* sudah dianggap fair dan *e-proc* memberikan transparansi informasi secara elektronik dan informasi tersebut bersifat sama bagi seluruh calon penyedia barang/jasa. Dari penelitian ini, maka dapat diuraikan faktor kepuasan dari pelaksanaan SPSE di Kabupaten Banjarnegara :

1. Hasil pemenang lelang melalui *e-proc* sudah dianggap fair.
2. *E-proc* memberikan transparansi informasi secara elektronik dan informasi tersebut bersifat sama bagi seluruh calon penyedia barang/jasa.

#### 4. Keunggulan

Perubahan dari sistem konvensional menjadi sistem elektronik ini berdampak pada meningkatnya keunggulan atau kualitas rekanan sebagai calon penyedia barang/jasa sehingga tindakan-tindakan seperti persaingan yang tidak sehat dapat diminimalisir. Sistem *e-procurement* juga menuntut penyedia barang/jasa untuk berlomba dalam melakukan efisiensi, sementara di sisi lain juga dituntut untuk menghasilkan output yang berkualitas. Hal ini juga mendukung iklim investasi yang kondusif antar pelaku usaha secara lokal maupun nasional. Keunggulan dari segi eksternal juga dapat dilihat dari peningkatan kualitas psikologi para calon penyedia barang/jasa, dimana tercipta kondisi yang memungkinkan masing-masing calon peserta mampu memperkirakan dan mengevaluasi diri berkaitan dengan tingkat kompetitifnya serta peluang untuk memenangkan persaingan, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan. Dari penelitian ini, maka dapat diuraikan faktor keunggulan dari pelaksanaan SPSE di Kabupaten Banjarnegara:

1. Untuk saat ini *e-proc* merupakan metode lelang yang baik di Kabupaten Banjarnegara.
2. *E-proc* mampu membuat perusahaan untuk melakukan peningkatan kemampuan agar dapat menciptakan/mengelola basis pasokan secara optimal

#### 5. Pengembangan

Pengembangan sebagai aspek terakhir (kelima) yang digunakan dalam menilai efektivitas pelaksanaan SPSE di Kab. Banjarnegara menggunakan sub aspek peningkatan kapasitas pengadaan barang/jasa dan kemampuan untuk menghadapi tuntutan perubahan. Dimana *e-procurement* di Kabupaten Banjarnegara telah meningkatkan kapasitas pengadaan barang/jasa dimana informasi yang disebarluaskan melalui media internet dapat diperoleh oleh lebih banyak calon penyedia barang/jasa baik lokal maupun nasional.

Selanjutnya berkaitan dengan aspek pengembangan, yang juga amat penting adalah pengembangan terhadap infrastruktur Sumber Daya Manusia. Dimana guna meningkatkan pelayanan bidang LPSE, maka perlu diimbangi dengan ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) yang andal, khususnya tenaga teknis sebagai ujung tombak pelaksanaan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE). Saat ini kualitas tenaga teknis masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan SPSE di Kab. Banjarnegara, sehingga peningkatan kapasitas dan keterampilan personil LPSE menjadi sesuatu yang mendesak demi peningkatan kualitas pengelolaan lelang secara elektronik. Dari penelitian ini, maka dapat diuraikan faktor pengembangan dari pelaksanaan SPSE di Kabupaten Banjarnegara:

1. *E-procurement* di Kabupaten Banjarnegara telah meningkatkan kapasitas pengadaan barang/jasa.
2. SPSE di Kabupaten Banjarnegara juga menuntut pengembangan kemampuan dan sertifikasi kemampuan staf dalam hal pengadaan barang/jasa, serta sudah dilakukan penempatan dan pelatihan berbasis IT bagi staf yang akan mengoperasikan layanan berbasis elektronik tersebut.

#### IV. KESIMPULAN

Bedasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain, bahwa penerapan sistem elektronik *procurement* atau *e-Procurement* di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara merupakan suatu bagian upaya untuk mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih efisien dan transparan, serta menjadi salah satu inisiasi dalam rangka mencegah korupsi khususnya dibidang pengadaan. Proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di Pemerintah Kab. Banjarnegara mampu meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang dapat dilihat berdasarkan 5 (lima) indikator penilaian yaitu:

##### 1. Produksi

Dengan sub aspek Peningkatan pelaksanaan verifikasi terhadap penyedia barang/jasa yang telah terdaftar di LPSE dan Peningkatan keikutsertaan penyedia barang/jasa dalam lelang di LPSE sudah berada pada kategori yang cukup baik.

##### 2. Efisiensi

Dengan sub aspek Anggaran yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Barang/Jasa melalui LPSE relatif tidak banyak dan Jangka waktu dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa lebih efisien.

##### 3. Kepuasan

Dengan sub aspek Kepuasan peserta pengadaan barang/jasa dan Kepuasan institusi/lembaga pengguna atas pencapaian pengadaan barang/jasa juga sudah dalam pencapaian yang baik dan dapat dikatakan pelaksanaan SPSE di Kabupaten Banjarnegara mampu menciptakan kepuasan yaitu kepuasan terhadap ketepatan waktu, kemudahan, transparansi dan penghematan biaya.

##### 4. Keunggulan

Keunggulan dalam perubahan internal dan eksternal setelah adanya SPSE di Kabupaten Banjarnegara yaitu meningkatnya keunggulan atau kualitas rekanan sebagai calon penyedia barang/jasa sehingga tindakan-tindakan seperti persaingan yang tidak sehat dapat diminimalisir. Keunggulan dari Segi eksternal, *E-proc* mampu membuat perusahaan untuk melakukan peningkatan kemampuan agar dapat menciptakan/mengelola basis

pasokan secara optimal dan mengevaluasi diri berkaitan dengan tingkat kompetitifnya serta peluang untuk memenangkan persaingan, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan.

#### 5. Pengembangan

*E-procurement* di Kabupaten Banjarnegara telah meningkatkan kapasitas pengadaan barang dan jasa. SPSE di Kabupaten Banjarnegara juga menuntut pengembangan kemampuan dan sertifikasi kemampuan staf dalam hal pengadaan barang/jasa, serta sudah dilakukan penempatan dan pelatihan berbasis IT bagi staf yang akan mengoperasikan layanan berbasis elektronik tersebut.

#### 4.1. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disampaikan beberapa saran terkait dengan penerapan sistem elektronik *procurement* di Pemerintah Kab. Banjarnegara, Berdasarkan 5 indikator efektivitas yang digunakan sebagai berikut:

##### 1. Produksi

Berkaitan dengan indikator produksi yang merupakan kemampuan organisasi untuk mencapai penawaran yang lebih banyak dari perusahaan/rekanan dengan memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan. Maka kedepannya agar pelaksanaan SPSE diikuti oleh semua instansi dan dilakukan secara berkelanjutan, tidak lagi kesannya hanya untuk formalitas. Dibutuhkan pemantauan yang dilakukan secara berkala, sehingga dengan demikian pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik ini menjadi lebih produktif dalam memproduksi jumlah dan output mutu pengadaan barang/jasa di Kabupaten Banjarnegara. Dalam meningkatkan indikator produksi juga dapat dilakukan dengan mengajak masyarakat, penyedia barang/jasa, serta pemerintah harus mempelajari penggunaan internet dan perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat umum tentang penerapan sistem *e-Procurement*. Dengan demikian tentunya SPSE dapat diikuti oleh lebih banyak penyedia barang/jasa dan efektivitas faktor produksi menjadi meningkat.

##### 2. Efisiensi

Ukuran efisiensi yang terdiri dari keuntungan dan modal, biaya per unit, pemborosan, waktu terluang, dan sebagainya. Efisiensi di ukur berdasarkan rasio antara keuntungan dengan biaya atau waktu yang digunakan. Dalam hal ini penulis dapat memberikan saran berupa pengembangan terhadap jaringan internet yang lebih diperluas. sehingga kebutuhan kualitas koneksi yang cukup baik dan memakan biaya yang cukup tinggi untuk membuka halaman LPSE dapat terakomodir. Serta agar LPSE Kab. Banjarnegara tetap

melakukan pengembangan terhadap kemudahan-kemudahan yang mampu diberikan oleh SPSE dapat menarik bagi para perusahaan rekanan untuk memperoleh informasi tanpa harus datang langsung.

c. Kepuasan

Untuk Kepuasan sebagai kriteria efektivitas mengacu pada keberhasilan organisasi untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka penulis dapat memberikan saran agar pelaksanaan *e-procurement* yang sangat membutuhkan kesigapan dalam perolehan informasi dan juga keterbaharuan informasi. Dimana fasilitas yang menunjang sangat diperlukan dalam proses ini. Untuk itu pemerintah perlu merespon secara cepat setiap permasalahan teknis yang terjadi dan juga melakukan *maintenance* pada sistem secara berkala. Untuk mampu memenuhi kebutuhan masyarakat juga agar pemerintah Kabupaten Banjarnegara perlu merekrut SDM yang handal dalam bidang teknologi. Serta agar kedepan keterbukaan informasi publik dapat lebih ditegakkan, khususnya terkait bentuk pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah kabupaten Banjarnegara, dimana sudah seharusnya informasi tersebut dapat dibagi kepada publik tanpa harus ditutup-tutupi. Hal ini sesuai dengan substansi *E-Government* dan *Good Governance* yakni adanya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan yang dijalankan, dan juga terkait kewajiban setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik.

d. Keunggulan

Keunggulan adalah tingkat dimana organisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal. Dalam hal ini saran yang dapat diberikan adalah agar pelaksanaan *e-procurement* di Kab. Banjarnegara didukung dengan kesiapan semua pihak, mulai dari pemerintah, rekanan, dan juga masyarakat sebagai saksi. Sehingga jika pemerintah menerapkan suatu sistem yang baru ada baiknya dipublikasikan ke semua kalangan, karena semua lapisan masyarakat membutuhkan informasi. Semua akan terintegrasi dengan baik, jika pemerintah mampu membimbing semua warganya, sehingga tidak ada penafsiran berbeda di berbagai pihak yang mampu menghambat berjalannya suatu keputusan baru dan keunggulan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan SPSE dapat terpenuhi.

e. Pengembangan

Untuk indikator Pengembangan yang mengukur kemampuan dan tanggungjawab organisasi untuk meningkatkan kapasitas dan potensinya untuk berkembang dalam menghadapi tuntutan masyarakat. Maka saran yang dapat diberikan agar kedepan LPSE dan ULP dapat diisi oleh para profesional dan menjadi *center of excellent* proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Sehingga tujuan menjadi Indonesia yang sejahtera, demokratis

dan berkeadilan akan terwujud dalam waktu yang tidak lama lagi. Selain itu, LKPP juga memotivasi setiap K/L/D/I melalui pemberian penghargaan tahunan kepada LPSE-LPSE yang memiliki kinerja terbaik sepanjang tahun dengan beberapa kriteria tertentu. Dimana keandalan LPSE perlu dipertahankan melalui sistem pemeliharaan dan anggaran pemeliharaan dari APBN/APBD baik terhadap *hardware, database, server, bandwidth*, maupun terhadap peningkatan sumber daya manusia yang berintegritas dan berkompeten. Tentu masih akan banyak tantangan ke depan yang akan dihadapi, namun komitmen nasional, regulasi, dan kemauan untuk beradaptasi pada perubahan dapat menjadi modal yang kuat dalam rangka mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih baik. Serta perlu dilakukan dievaluasi sehingga semua faktor dapat dimaksimalkan dalam penerapan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, M Tatang, 2000, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bryson, John, 2007, *Strategic Planning for Public and Non Profit Organization – a Guide Strengthening and Sustaining Achievement, terjemahan Miftahudin Perencanaan Strategis Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Danim, Sudarwan. 2004, *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Bengkulu: PT RINEKA CIPTA.
- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Etzioni, Amitai, 1985, *Organisasi-Organisasi Modern*. Jakarta : UI-Press.
- Gibson, James L. Ivancevich, John M. and Donnely, James H Jr, 1997, *Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur dan Proses*, Jakarta: Erlangga.
- Hardjito, Dydiet, 2001, *Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Herujito, Yayat. 2004. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Irawan, Prasetya. 2007, *Pengantar Ringkas Metode Eksperimen untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta : UMJ Press.
- Jimmy, Chr L.Gaol, 2008, *Sistem Informasi Manajemen: Pemahaman dan Aplikasi*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

- M, Manulang, 2008, *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Moleong, Lexy J, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M, 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nanawi, 2007, *Metodologi Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Puspitosari, Hesti & Kurniawan, Khalikussabir Luthfi J. 2012. *Filosofi Pelayanan Publik*. Jakarta: Setara Press.
- Rangkuti, Freddy. 2011. *SWOT Balanced Scorecard Teknik Menyusun Strategi Korporat yang Efektif plus Cara Mengelola Kinerja dan Risiko*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance: Pemerintahan yang Baik Bagian Kedua Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Soeprapto, Riyadi. 2006. *Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Publik*. Malang: Riyad Press.
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Administratif*, Alfabeta, Bandung.
- Sondang P. Siagian, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Steers, Richard, 1985, *Efektivitas Organisasi*, diterjemahkan Magdalena Jamin, Erlangga, Jakarta.
- Sumaryadi, Nyoman, 2005, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Jakarta : Citra Utama.
- Turner, Mark and Hulme, David. 1997. *Governance, Administrasi, and Development: Making The State Work*. London: MacMillan Press Ltd.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 34 Seri E Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 623 Tahun 2010 tentang *Pegadaan Barag/Jasa Pemerintah Kabupaten Banjaregara Secara Elektronik*.
- Surat Edaran Bupati Banjarnegara Nomor 050/1671 tanggal 11 Mei 2012 tentang *Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik*.
- <http://lpse.banjarnegarakab.go.id>.
- <http://www.lkpp.go.id>
- <http://www.wartanews.com>